

Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Penerapan *Smart Living*

Asyifa Fadia Puspita*, Ernady Syaodih

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*puspitaasyifa@gmail.com, ernadysyaodih@gmail.com

Abstract. The city of Bandung applies the concept of a smart city, as an effort to overcome urban problems and provide a sense of life for the people of Bandung City, especially Coblong District through smart living. Smart living is the concept of urban development to realize a quality and sustainable life through smart thinking. However, until now, Coblong District itself still has various problems that occur in aspects of urban life such as congestion problems, uneven facilities and infrastructure, slums, inadequate public transportation, and low levels of security. Therefore, the author conducted a study that aims to examine the role of the performance of the Bandung City regional government in applying the Smart Living concept to realize the feasibility of living standards of people in Coblong District. There are 4 main indicators of Smart Living consisting of 15 variables that are used to assess the level of satisfaction of the people of District Coblong. The methodology used in this study is a mixed method approach with data collection methods carried out primarily and secondarily and processed using the Importance Performance Analysis method with the help of IBM SPSS software. The average value of entire smart living variable for suitability level between performance and importance is 76.07%, which means the quality of service that is being delivered by the government in the implementation of smart living haven't matched up with the expectations of Coblong district society, therefore, improvements in performance is needed, especially in variables that are a priority the main ones are Realizing access to the availability of healthy food and drink and health, Realizing a safe, peaceful and orderly urban environment, Integrated security.

Keywords: *Smart Living, Quality of life, Importance Performance Analysis.*

Abstrak. Kota Bandung menerapkan konsep smart city, sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya Kecamatan Coblong melalui smart living. Smart living merupakan konsep pembangunan kota untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemikiran cerdas. Namun hingga saat ini Kecamatan Coblong sendiri masih memiliki berbagai permasalahan yang terjadi dalam aspek kehidupan perkotaan seperti masalah kemacetan, sarana dan prasarana yang tidak merata, kawasan kumuh, transportasi umum yang tidak memadai, dan tingkat keamanan yang rendah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji peran kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dalam menerapkan konsep Smart Living untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Coblong. Terdapat 4 indikator utama Smart Living yang terdiri dari 15 variabel yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Coblong. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan sekunder serta diproses menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dengan bantuan software IBM SPSS. Nilai rata-rata seluruh variabel smart living untuk tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan adalah 76,07%, yang artinya kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Smart Living Belum Sesuai dengan harapan masyarakat di Kecamatan Coblong sehingga perlu peningkatan kinerja khususnya dalam variabel yang menjadi prioritas utama yaitu Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minum sehat dan kesehatan, Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tentram dan tertib, Keamanan yang terintegrasi.

Kata Kunci: *Smart Living, Kualitas Hidup, Importance Performance Analysis.*

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs. SDGs merupakan suatu agenda pembangunan berkelanjutan dengan program-program inovatif yang memiliki 17 tujuan yang akan dicapai. Dimana salah satu tujuannya yakni Tujuan Ke-11 Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandung menerapkan Smart City dengan tujuan agar berfungsi secara optimal dalam mengelola sumber daya kota yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta dapat mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dengan memberikan solusi yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi serta didukung oleh infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Sebagai tindak lanjut untuk keberhasilan Smart City Kota Bandung maka terdapat kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas Periode 2018-2023.

Smart Living menurut Masterplan Bandung Smart City adalah tata kelola untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat melalui pola hidup, kualitas kesehatan, moda transportasi. Sedangkan menurut Govada, et.al *smart living* merupakan perpaduan untuk mewujudkan kehidupan cerdas dan berkelanjutan dengan menerapkan pemikiran cerdas untuk pembangunan kota [1]. Dalam penerapannya terdapat 4 (empat) indikator utama dalam *smart living*, yaitu harmonisasi tata ruang (*Harmony*), Prasarana Kesehatan (*Health*), Sarana Transportasi (*Mobility*), dan Keamanan (*Security*).

Kota Bandung yang merupakan salah satu kota pelopor dalam penerapan *smart city* ini dikenal sebagai Bandung Kota Kreatif, Pendidikan dan Kota wisata kuliner dan fashion [2]. Salah satu Kecamatan yang merupakan representasi berbagai julukan tersebut adalah Kecamatan Coblong. Kecamatan Coblong merupakan bagian dari SWK Cibeuying yang memiliki tujuan penataan ruang sebagai Travelpolis, sehingga terkenal dengan kawasan wisata, dan pusat kuliner. Hal ini menyebabkan banyak pendatang dari luar wilayah, maka lingkungan perkotaan di Kecamatan Coblong harus layak huni, aman serta memiliki infrastruktur yang lengkap dan memadai, sehingga diperlukan penerapan konsep *smart living* yang baik di wilayah Kecamatan Coblong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Coblong serta memudahkan untuk para pendatang dan wisatawan. Selain itu berdasarkan RPJMD Kota Bandung dalam penilaian *liveable city*, salah satu kecamatan yang memiliki nilai tertinggi adalah Kecamatan Coblong.

Akan tetapi menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, terdapat isu permasalahan di Kecamatan Coblong yang terkait dengan indikator smart living, yaitu:

1. Harmonisasi tata ruang (*Harmony*) meliputi pelanggaran mendirikan bangunan, permukiman kumuh, dan titik lokasi kemacetan yang belum dapat teratasi
2. Prasarana Kesehatan (*Health*) meliputi fasilitas kesehatan milik pemerintah yang belum terstandarisasi dengan baik, tidak ada jaminan pasti untuk ketersediaan bahan pokok, dan minimnya pemanfaatan teknologi untuk kesehatan.
3. Sarana Transportasi (*Mobility*) meliputi rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, dan kondisi fasilitas fisik transportasi yang kurang memadai.
4. Keamanan (*Security*) meliputi rendahnya keamanan publik di lingkungan hunian dan belum terdapat keamanan yang terintegrasi dengan baik.

Program *Smart Living* yang telah dilaksanakan realitanya belum dapat menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang layak huni. Terdapat beberapa program seperti ATCS dimana selama program ini berjalan permasalahan lalu lintas telah mengalami penurunan, namun nilainya tidak signifikan [3], selain itu juga terdapat program BOSEH bike sharing yang tidak berjalan dengan baik dan belum optimal karena membutuhkan penyesuaian, selain itu jalur sepeda yang tersedia di Kota Bandung juga masih sangat terbatas.[4].

Permasalahan terkait Smart Living yang belum teratasi dapat disebabkan oleh kurang

optimalnya kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan *smart living* dan belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah berdasarkan penilaian masyarakat untuk mempercepat tercapainya tujuan *smart living* yang tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah Mengkaji peran kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dalam menerapkan konsep Smart Living untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Coblong. Selanjutnya sasaran dalam penelitian ini yaitu Teridentifikasinya capaian penerapan *smart living* di Kecamatan Coblong dengan menilai tingkat kesesuaian pelayanan pemerintah dengan harapan masyarakat Kecamatan Coblong.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan mixed methods dengan menggunakan metode sequential explanatory. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Coblong yang berjumlah 110.205 jiwa

Dengan teknik pengambilan sampel untuk wawancara adalah *purposive sampling* dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 17 orang, sedangkan teknik pengambilan sampel untuk responden kuesioner menggunakan teknik *random sampling*, dan diperoleh jumlah responden sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, studi pustaka, dan survei data instansional yang dilengkapi dengan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif yang digunakan untuk melengkapi hasil *Importance Performance Analysis (IPA)*.

Importance Performance Analysis adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja apa yang harus ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam memenuhi keputusan para pengguna jasa (konsumen) [5]. Metode IPA ini dapat menilai kesenjangan antara kinerja yang diberikan dan harapan masyarakat, sehingga menghasilkan tingkat kesesuaian serta dapat mengetahui variabel mana saja yang belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian maka dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

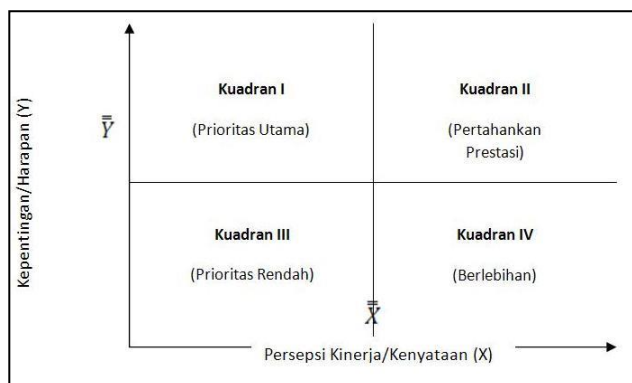
Keterangan:

Tki = Tingkat kesesuaian responden

Xi = skor penilaian kinerja pelayanan pemerintah

Yi = skor penilaian kepentingan (harapan) masyarakat

Hasil dari tingkat kesesuaian tersebut dikelompokkan berdasarkan skala kepentingan pada seluruh variable yang ada menjadi 4 kuadran dengan pembagian sebagai berikut:



Gambar 1. Kuadran IPA

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Indikator	Variabel	Kriteria
Harmonisasi Tataruang	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH, RTB) di lingkungan perumahan
		Lingkungan pusat kegiatan bisnis yang dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau
		Fasilitas Tempat Rekreasi
		Titik Lokasi Kemacetan yang teratasi
		Perbaikan Rumah tidak layak huni
	Kualitas Prasarana	Ketersediaan Listrik
		Ketersediaan Air Minum
		Ketersediaan Sanitasi
		Ketersediaan Telekomunikasi
	Kualitas Sarana	Ketersediaan Sarana Pendidikan
		Ketersediaan Tempat Ibadah
		Ketersediaan Sarana Pemakaman
	Adanya standarisasi dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah	Terdapat standarisasi atau aturan yang diterapkan dalam pembangunan wilayah
Pengelolaan dan pengawasan ruang publik	ARDTRK (Aplikasi Rencana Detail Tata Ruang Kota)	
	SIPETRUK (Sistem Informasi Penataan Ruang Kota)	
Kesehatan	Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat dan kesehatan	Layanan kesehatan berbasis teknologi informasi
		Kemudahan mendapat layanan kesehatan
		Terdapat emergency system untuk layanan kesehatan yaitu Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
		Ketersediaan informasi produksi hasil pangan
		Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi
	Kualitas Hidup	Angka Kemiskinan
		Digitalisasi dan pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Bantuan Sosial
	Ramah Lansia	Ketersediaan sarana prasarana ramah lansia
		Kegiatan untuk lansia
		Program sehari bersama lansia
		Aplikasi cepat tanggap untuk membantu lansia
	Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berstandar internasional	Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar layanan
Mobility	Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin aksesibilitas yang tinggi	Angkutan Masal yang tersedia yang menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individu, publik
		Penggunaan Smart Card untuk akses terhadap, transportasi
		Pengembangan kendaraan listrik
		Halte dalam kondisi baik
		Ketersediaan informasi rute kendaraan umum
	Public Transportation by default	Jumlah Masyarakat pengguna publik transport
	Jalur sepeda	Jumlah/ panjang rute sepeda
	Transportasi ramah lingkungan	Sosialisasi penggunaan bike sharing

Indikator	Variabel	Kriteria
		Kemudahan akses penggunaan bike sharing
Keamanan	Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tenang dan tertib	Tersedia CCTV di Lingkungan perumahan
	Keamanan yang terintegrasi	Smart Crime Prevention, penggunaan teknologi dalam pencegahan kejahatan

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tingkat Kesesuaian antara kinerja dan kepentingan

Tingkat kesesuaian digunakan untuk melihat kesesuaian antaran kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden dengan total 15 variabel untuk 4 indikator, maka didapatkan nilai yang telah diambil rata-ratanya untuk menentukan tingkat kepuasan responden berdasarkan tingkat kinerja dan tingkat kepentingan setiap variabel. Dengan kriteria penilaian tingkat kesesuaian responden terdiri dari 3 tingkat [6] diantaranya:

1. Tingkat kesesuaian >100% artinya kualitas layanan sangat sesuai
2. Tingkat kesesuaian 80-100% artinya kualitas layanan sesuai
3. Tingkat kesesuaian <80% artinya kualitas layanan belum sesuai

Tabel 2. Hasil Tingkat Kesesuaian

Kode	Variabel	Kinerja	Kepentingan	Tki (%)	Keterangan
V1	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis	3,14	4,0	78,5	Belum Sesuai
V2	Kualitas Prasarana	3,46	4,12	83,98	Sesuai
V3	Kualitas Sarana	3,44	4,20	82,00	Sesuai
V4	Adanya standarisasi dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah	2,99	3,87	77,26	Belum Sesuai
V5	Pengelolaan dan pengawasan ruang publik	2,97	3,72	79,84	Belum Sesuai
V6	Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan kesehatan	2,9	4,06	71,43	Belum Sesuai
V7	Kualitas Hidup	3,33	4,16	80,05	Sesuai
V8	Ramah Lansia	2,72	3,78	72,05	Belum Sesuai
V9	Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berstandar internasional	3,73	4,25	87,76	Sesuai
V10	Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas	2,75	3,86	71,17	Belum Sesuai
V11	Public Transportation by default	2,86	3,89	73,52	Belum Sesuai
V12	Jalur Sepeda	3,23	3,85	83,90	Sesuai
V13	Transportasi ramah lingkungan	2,95	3,63	81,27	Sesuai
V14	Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tenang dan tertib	2,81	4,33	64,90	Belum Sesuai
V15	Keamanan yang terintegrasi	2,23	4,18	53,35	Belum Sesuai
	Total	45,51	59,9	1140,98	
	Rata-Rata	3,03	4,0	76,07	Belum Sesuai

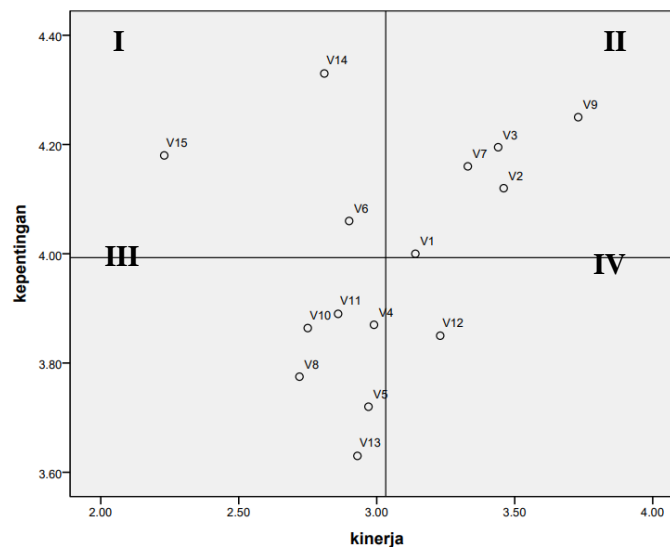
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan kinerja dan kepentingan untuk setiap variabel, didapatkan hasil nilai rata-rata tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan pada Variabel

Smart Living adalah 76,07% maka kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Coblong dalam penerapan Smart Living Belum Sesuai, dan pemerintah belum dapat memberikan kualitas kinerja pelayanan yang baik serta belum dapat memenuhi harapan masyarakat di Kecamatan Coblong.

Kuadran IPA

Selanjutnya untuk mengetahui posisi dan skala prioritas dalam menentukan tindakan atau upaya yang sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandung. Untuk menentukan letak kuadran untuk setiap variabel maka dengan menggunakan nilai rata-rata dari setiap variabel kinerja (importance) dan kepentingan (performance), dan untuk menentukan garis tegak lurus perpotongan pada sumbu x dan y maka diperoleh dari hasil rata-rata total skor tingkat kinerja (x) dan tingkat kepentingan (harapan) (y) maka didapatkan hasil untuk sumbu x adalah **3,03** dan untuk sumbu y adalah **4,0**. Sesuai dengan nilai rata-rata total pada **Tabel 2**. Setelah mengetahui garis tegak lurus perpotongan sumbu x dan sumbu y maka dilakukan penempatan posisi nilai rata-rata setiap variabel dengan bantuan Software IBM SPSS.



Gambar 2. Diagram Kartesius Kuadran IPA

Berdasarkan diagram kartesius merupakan hasil pengolahan tingkat kesesuaian IPA yang kemudian dipetakan menjadi 4 kuadran, kemudian didapatkan hasil sebaran variabel penilaian smart living yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Kuadran I Prioritas Utama (*Concentrate Here*) menunjukkan variabel penelitian yang dianggap penting oleh masyarakat namun tidak terlaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga atribut tersebut dinilai belum sesuai dan sesuai. (*High Importance dan Low Performance*) Atribut pernyataan yang termasuk kedalam kuadran I dan menjadi prioritas utama antara lain: Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat dan kesehatan (V6), Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tertam dan tertib (V14) dan Keamanan yang terintegrasi (V15).
2. Kuadran II Pertahankan Prestasi (*Keep Up the Good Work*) variabel penelitian dalam kuadran ini dianggap penting dan sudah sesuai yang diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan masyarakat. (*High Importance and High Performance*). Atribut pernyataan yang termasuk kedalam kuadran II dan kinerja pelayanannya harus dipertahankan antara lain: Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis (V1), Kualitas Prasarana (V2), Kualitas Sarana (V3) Kualitas Hidup (V7), dan pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berstandar internasional (V9)

3. Kuadran III Prioritas Rendah (*Low Priority*) Pada kuadran ini terdapat variabel penelitian yang dianggap mempunyai tingkat pelaksanaan kinerja yang rendah dan tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan oleh masyarakat. (*Low Importance and Low Performance*) Atribut pernyataan yang termasuk kedalam kuadran III dengan prioritas rendah adalah Adanya standarisasi dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah(V4), Pengelolaan dan pengawasan ruang publik (V5), Ramah Lansia (V8), Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin aksesibilitas yang tinggi (V10), *Public Transportation by default* (V11), dan Transportasi Ramah lingkungan (V13).
4. Kuadran IV Berlebihan (*Possibly Overkill*) Pada kuadran ini terdapat atribut pernyataan yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh masyarakat namun dalam pelaksanaannya kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Coblong sudah baik (*Low Importance and High Performance*). Atribut pernyataan yang termasuk kedalam kuadran IV atau berlebihan adalah Jalur Sepeda (V12)

Berdasarkan hasil kadran IPA tersebut maka terdapat 3 variabel yang berada pada kuadran I yang merupakan variabel prioritas utama, maka upaya peningkatan yang dapat dilakukan agar variabel tersebut dapat memenuhi harapan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat dan kesehatan (V6)
 - Melakukan pendataan sesuai standar jumlah pangan yang tersedia di pasar tradisional, swalayan dan tempat usaha lainnya secara berkala.
 - Mengembangkan aplikasi informasi bahan pokok secara real time
 - Mengembangkan aplikasi SIKDA Kota Bandung untuk pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi
 - Melakukan penambahan fasilitas pada sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia
2. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tentram dan tertib (V14)
 - Memfasilitasi ketersediaan CCTV di lingkungan perumahan
 - Membuat kerjasama antar OPD dan stake holder yang baik dalam menyediakan fasilitas keamanan
3. Keamanan yang terintegrasi (V15).
 - Melakukan pemetaan dan pendataan tindakan kasus kriminal yang terjadi di lingkungan Kecamatan Coblong
 - Menyediakan CCTV di tempat publik yang terintegrasi secara langsung dengan pihak kepolisian setempat

D. Kesimpulan

Kecamatan Coblong termasuk ke dalam SWK Cibeunying dengan fokus tujuan penataan ruang sesuai RDTR adalah *Travelpolis*, sehingga menjadi kecamatan pusat kuliner dan wisata. Pada tahun 2018 Kecamatan Coblong mendapatkan penilaian yang tinggi dalam indeks *liveable city*. Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan, hasil wawancara, serta hasil analisis IPA mengenai penerapan Smart Living di Kecamatan Coblong, nilai rata-rata tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan pada variabel *smart living* adalah 76,07% maka kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Coblong dalam penerapan *smart living* Belum Sesuai, dan pemerintah belum dapat memberikan kualitas kinerja pelayanan yang baik karena belum dapat memenuhi harapan masyarakat di Kecamatan Coblong.

Terdapat 15 variabel penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan smart living, dan didapatkan hasil bahwa 9 variabel merupakan *low performance* yang perlu dilakukan peningkatan kinerja, dengan prioritas utama di kuadran I yang terdiri dari 3 variabel yaitu Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minum sehat dan kesehatan, Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tentram dan tertib , Keamanan yang terintegritas.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan, Bapak Dr. Ernady Syaodih.Ir.,M.T. selaku Dosen pembimbing

yang telah memberikan bimbingan serta arahan dan saran dalam melakukan penelitian ini, segenap dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung dan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, dan juga kepada pihak OPD dan *stake holder* terkait yang terlibat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] H. Govada, "Smart Living for Smart Hongkong," in *Vinod Kumar, T. (eds) Smart Living for Smart Cities*, Springer, Singapore, 2020, pp. 75–135.
- [2] I. Sjafari, "Bandung Kota Kreatif, Pendidikan, Wisata dan Nyaris Menjadi Ibukota RI," *Kompasiana*, Bandung, 2016.
- [3] M. S. Haq, "Smart City : Area Traffic Control System Daftar Isi," pp. 1–19, 2018.
- [4] D. V. Alaydrus and I. H. Agustina, "Kepuasan Pengendara Motor terhadap Penggunaan Smart System Parking di Ruas Jalan Braga," pp. 54–60, 2022.
- [5] A. W. Putra, Bimasakti Sinar; Ghiffari, Muhammad Galih; Septiandie, "Mengukur Indikator Keberhasilan Smart City di Kota Bandung," no. 10, p. 5, 2018.
- [6] J. A. Martilla and J. C. James, "Importance-performance analysis," 1997.
- [7] W. Purnomo and D. Riandadari, "Analisa Kepuasan Pelanggan Terhadap Bengkel dengan Metode IPA (Importance Performance Analysis) di PT. Arina Parama Jaya Gresik," *J. Tek. Mesin*, vol. 03, no. 3, pp. 54–63, 2015.